

**EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR
SEBAGAI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN**

Syarifsyah Asyraf Syabana

NPP. 29.0753

*Asdaf Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: syahasyraf07@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of increasing the number of neglected children and the problems experienced by the Social Service in implementing social welfare services for neglected children in Tangerang Regency.. **Purpose:** The purpose of this study was to analyze and describe social welfare services for neglected children in Tangerang Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The theory used is the Effectiveness Theory by Sondang P. Siagian, where there are 5 dimensions that are seen, namely Resources, Funds, Facilities and Infrastructure, Quality and Quality, and Time. Data collection techniques using interviews, observation and documentation.. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that human resources are still inadequate, the existing funds are still not sufficient to meet the needs, there is still a lack of facilities and infrastructure, the quality of service is good but in quantity there are still many neglected children who have not received services, and the target still little service. **Conclusion:** The implementation of social welfare services for neglected children in Tangerang Regency has been carried out in accordance with applicable regulations, but there are still various obstacles in its implementation in the form of a lack of service support aspects. In order to increase the effectiveness of welfare services for neglected children, it is recommended to optimize and maximize the supporting aspects of existing services, as well as increase the target of social welfare services for neglected children.

Keywords: Service; Social welfare; Homeless child

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan peningkatan jumlah anak terlantar dan permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas oleh Sondang P. Siagian, dimana ada 5 dimensi yang dilihat yaitu Sumber Daya, Dana, Sarana dan Prasarana, Kualitas dan Kualitas, serta Waktu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia masih belum memadai, dana yang ada masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan tergolong baik namun secara kuantitas

masih banyak anak terlantar yang belum menerima pelayanan, dan target pelayanan yang masih sedikit.. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya yang berupa masih kurangnya aspek penunjang pelayanan. Guna meningkatkan meningkatkan efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, disarankan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan aspek penunjang pelayanan yang ada, serta meningkatkan target pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, .

Kata kunci: Pelayanan; Kesejahteraan Sosial; Anak Terlantar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Tujuan negara tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1954. Namun, dalam pencapaian tujuan tersebut, Indonesia dihadapi dengan fenomena dan permasalahan dalam mencapai kesejahteraan sosial, salah satunya masalah yang dialami oleh anak yang mengalami keterlantaran sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dilansir dari Beritasatu.com., data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 4,1 juta jiwa dan jumlahnya bertambah serta ditambah 35.000 anak mengalami eksploitasi. Keadaan tersebut memcerminkan amanat konstitusi terhadap fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara belum sepenuhnya terwujud. Adanya anak terlantar tidak lepas dari Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), bahwa anak terlantar timbul akibat dari banyak jumlah PMKS yang ada di Indonesia. Keberadaan anak terlantar di Indonesia banyak terdapat di kota besar seperti Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kota penyangga ibukota negara.

Data penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sangat padatnya penduduk di kabupaten Tangerang tidak lepas dari permasalahan sosial yang dialami penduduk kabupaten Tangerang terutama pada permasalahan kemiskinan dan keterlantaran. Banyaknya jumlah total penduduk Kabupaten Tangerang yang mencapai 3.245.619 jiwa dan 192.700 Jiwa diantaranya merupakan Penduduk dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta dijelaskan bahwa terdapat 66033 jiwa merupakan anak terlantar (BPS Kabupaten Tangerang, 2021). Angka tersebut menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai urutan pertama daerah dengan jumlah anak terlantar terbanyak di Provinsi Banten.

Kesejahteraan sosial merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan setiap manusia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kewajiban negara dalam memelihara dan mensejahterakan anak terlantar masih belum tercapai sepenuhnya, hal ini dibuktikan dengan tercatatnya masih banyaknya jumlah anak terlantar di Indonesia. Pemerintah sebagai bagian dari negara memiliki kewajiban dalam mengurus anak terlantar. Pemerintahan daerah sebagai wakil pemerintah pusat daerah yang mempunyai wewenang untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya urusan yang berkaitan dengan permasalahan sosial di daerah. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah daerah yang menanungi urusan di bidang sosial salah satunya pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang di berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial; dan Peraturan Daerah Kab. Tangerang No. 12 Tahun 2007 tentang Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Efektivitas Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dapat diukur dari beberapa aspek diantaranya : 1) Dana; 2) Sumber Daya; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Kualitas dan Kuantitas; dan 5) Waktu (Siagian, 2019). Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Namun, dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala di beberapa aspek pelayanan sehingga hambatan bagi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada anak terlantar di Kabupaten Tangerang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang. Masih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak terlantar yang belum terakses pelayanan kebutuhan dasar. Masih Kurangnya pelayanan dasar dan bantuan sosial kepada anak terlantar. Pelayanan dasar tersebut seperti tempat tinggal (panti sosial), pelayanan rehabilitasi, pelayanan pembinaan dan pelatihan bagi anak terlantar, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan pada isu strategis dan permasalahan pada dinas sosial kabupaten Tangerang. (Sumber : LKIP Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2020).

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Masih Kekurangan Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan fasilitas tempat tinggal anak terlantar . Jumlah anak terlantar yang tinggi di Kabupaten Tangerang seharusnya harus di imbangi dengan jumlah fasilitas tempat tinggal untuk anak terlantar yang memadai dan sarana prasarana operasional Dinas Sosial yang mendukung. (LKIP Dinas Sosial Kabupaten Tangerang 2020).

Kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola pelayanan terhadap anak terlantar baik di Kantor Dinas Sosial maupun di panti sosial dan UPTD. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan bagi anak terlantar. Adapun data jumlah pegawai dinas sosial terdiri atas 35 pegawai dan terjadi kekosongan jabatan pada kepala seksi pemberdayaan dan penanganan fakir miskin. (LKIP Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2020). Dikutip dari Lensa Fokus: Kepala UPTD Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa hanya 3 PNS di panti yang dibantu dengan 18 tenaga operasional terdiri atas asesmen, administratif, petugas kebersihan dan penjaga tanaman. UPTD Dinas Sosial Kabupaten Tangerang masih kekurangan tenaga ahli dibidang sosial untuk tugas penanganan dan pendampingan terhadap penghuni panti yang hanya dapat dilakukan oleh petugas ahli tersebut. (Sumber: *Lensa Fokus. UPTD Rehabilitasi PMKS Dinas Sosial Kab. Tangerang Terus Tingkatkan Pelayanan Dan Penataan Lingkungan*).

Hambatan lainnya terdapat pada aspek ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Tangerang. Hal ini diperkuat dengan informasi yang dikutip dari : *Jurnaltangerang.co*, Sekretaris Dinas Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa dana yang ada pada Dinas Sosial cukup minim yaitu sekitar 6 miliar, dana tersebut tidak dapat mengcover penyelesaian permasalahan sosial dan program Dinas Sosial. (Sumber : *Jurnaltangerang.com. Dinsos Ngaku Kurang Anggaran Untuk Atasi Masalah Sosial*).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, berupa penelitian terhadap pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Penelitian Angelina, dkk dengan judul Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Manado

(Angelina dkk, 2019) menemukan terdapatnya permasalahan Produktivitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan yang belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala dalam pemberian bantuan sosial dalam pelaksanaan program anak terlantar, serta dalam pemberian bantuan sosial kepada anak terlantar belum sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk kualitas pelayanan sendiri yang diberikan oleh dinas sosial sudah berjalan dengan baik dimana masyarakat dapat secara langsung menerima data dan informasi yang di perlukan. Penelitian Leni dan Dedi menemukan bahwa terdapat beberapa Langkah yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan anak terlantar diantaranya : perlu dibuat kebijakan yang diarahkan pada kepentingan dan permasalahan anak terlantar, serta perlu adanya peningkatan pendekatan dan program pelayanan untuk memaksimalkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. (Leni & Dedi, 2020). Penelitian Biru dkk, selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan program layanan kesejahteraan bagi anak jalanan di UPTD. Kampung anak Negeri masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan anak yang belum bertindak normatif sehingga sulit di paksa untuk mengikuti atururaturan yang ada seperti mengikuti pendidikan formal dan dan peltihan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Selanjutnya faktor keaktifan, motivasi dan keinginan untuk berprestasi masih dianggap rendah sehingga program tersebut masih belum berjalan dengan baik (Biru dkk, 2021). Penelitian Nisah & Hamam selanjutnya berkaitan dengan peran pemerintah dalam melakukan perlindungan sosial bagi anak terlantar sesuai dengan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nisah & Hamam, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Nina & Dody mengemukakan bahwa Implementasi program pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dapat dikatakan belum efektif, dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. (Nina & Dody, 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), metodenya yang digunakan menggunakan deskriptif Kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial dan UPTD. Panti Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tangerang Provinsi Banten juga berbeda dengan penelitian Angelina, Leni , Biru, Anna, maupun Nina. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Siagian (Siagian, 2019) yang menyatakan bahwa suatu efektivitas dapat diukur melalui beberapa dimensi yaitu sumber daya, dana, sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas, dan waktu.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Simangungsong, 2017). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Kepala Sub Keuangan, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Lansia, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Korban Bencana, Kepala UPTD. Rehabilitasi Sosial, Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Sirojul Athfal, 5 orang anak terlantar, dan 5 orang masyarakat. Teknik analisis data dan pengolahan data menggunakan reduksi data, *display data*, dan verifikasi data (Miles & Humberman,1984).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dan menggambarkan efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten menggunakan pendapat dari Siagian yang menyatakan bahwa suatu efektivitas dapat diukur melalui beberapa dimensi yaitu sumber daya, dana, sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas, dan waktu. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Sumber Daya

Penulis melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar berdasarkan aspek sumber daya, Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia atau pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 1.
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021

Lokasi Pegawai	Status Pegawai	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
Dinas Sosial Kabupaten Tangerang	PNS	6	14	3	9	-	-	32
	PPPK	-	6	3	4	2	-	15
UPT. Rehasilitasi Sosial Dinas Sosial	PNS	1	2	-	-	-	-	3
	PPPK	-	14	4	6	-	-	24
Jumlah Total								74

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang 2022

Pada **Tabel 1.** dijelaskan bahwa jumlah PNS yang berpendidikan S2 berjumlah 7 orang, S1 berjumlah 16 orang, D3 berjumlah 3 orang, dan SMA 9 orang. Pendidikan tertinggi PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang adalah jenjang Pendidikan S2 dan jenjang terandahnya adalah SMA, dan tidak ada PNS dengan jenjang Pendidikan SMA. Jumlah PPPK di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang berjumlah 39 orang dengan jenjang Pendidikan S1 berjumlah 20 orang, D3 berjumlah 7 orang, SMA berjumlah 10 orang, dan SMP berjumlah 2 orang. Pendidikan Tertinggi PPPK di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang adalah jenjang Pendidikan S1 dan jenjang terandahnya adalah SMP, dan tidak ada PPPK dengan jenjang Pendidikan S2 dan SD.

Berdasarkan pengamatan di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dapat diterangkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tangerang masih banyak membutuhkan tenaga pegawai dikarenakan Dinas Sosial masih mengalami kekurangan pegawai. Ditambah masih adanya pegawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki. Lebih lanjut ditegaskan oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mengatakan “Jika berbicara terkait dengan masalah dan kebutuhan kepegawaian, sebenarnya dinas masih membutuhkan pegawai yang dapat mendukung operasional pelaksanaan pelayanan baik di kantor maupun dalam penjangkauan PMKS”. Dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala UPTD. Panti Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa “Kami di panti masih kekurangan tenaga ahli dibidang sosial untuk tugas penanganan dan pendampingan bagi penghuni panti, karena tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh petugas ahli dibidang tersebut”.

Penulis menyimpulkan pengukuran efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak di Kabupaten Tangerang dapat diukur oleh keadaan sumber daya pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Dinas Sosial mengalami hambatan berupa kekurangan sumber daya baik di Dinas Sosial itu sendiri maupun di UPTD. Panti Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tangerang.

3.2. Dana

Penulis melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar berdasarkan aspek dana, keberhasilannya suatu program tidak lepas dari pengelolaan dan pemanfaatan dana yang baik dan efektif.

Tabel 2.

Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Periode Tanggal 31 Desember 2021

Program	Pagu Anggaran	Penyerapan Anggaran		Efisiensi/ Eliminasi
		Rp.	%	
Program Pelayanan Admisistrasi Perkantoran	Rp. 825.166.500	Rp. 773.572.734	93,75%	Rp. 51.593.766
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 165.035.000	Rp. 158.885.000	96,27%	Rp. 6.150.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. -	Rp. -	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 28.413.000	Rp. 28.413.000	100%	-
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Rp. 177.977.000	Rp. 177.677.000	99,83%	Rp. 300.000
Program Pemeberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah	Rp. 641.224.000	Rp. 623.765.000	97,28%	Rp. 17.459.000

Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 712.182.500	Rp. 688.780.500	96,71%	Rp. 23.402.000
Program Pembinaan Panti dan Rumah Singgah	Rp. 745.200.000	Rp. 742.900.000	99,69%	Rp. 2.300.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.704.665.000	Rp. 1.558.714.115	91,44%	Rp. 145.950.885
Program Pengelolaan Data, Bina Sosial dan Peningkatan Nilai-Nilai Keperintisan dan Kepahlawanan	Rp. 494.305.000	Rp. 415.475.000	84,05 %	Rp. 78.830.000
Total Anggaran	Rp.5.494.168.000	Rp. 5.168.182.349	94,07 %	Rp.325.985.651

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang 2022

Pada **Tabel 2.**, dijelaskan bahwa ketersediaan dana dalam pagu anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sebesar Rp.5.494.168.000 dan mengalami penyerapan anggaran menjadi menjadi Rp. 5.168.182.349 atau sebesar 94,07% dari pagu anggaran dengan jumlah eliminasi sebesar Rp.325.985.651. pendanaan dana kegiatan untuk kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terdapat dalam anggaran pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa Dinas Sosial masih membutuhkan banyak anggaran untuk pendanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa “Sebenarnya kami masih membutuhkan dana untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Dana pada program pelayanan kesejahteraan sosial sendiri terbagi untuk kegiatan - kegiatan pelayanan terhadap 26 jenis PMKS lainnya”. Selanjutnya Kepala UPT. Panti Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa “Anggaran untuk anak terlantar di dalam panti masih belum mencukupi secara menyeluruh, dikarenakan terdapat PMKS lainnya, hal ini juga dipengaruhi dengan adanya penambahan penghuni panti yang datang di waktu yang tidak ditentukan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tangerang masih mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang kegiatan pelayanan kesejahteraan bagi anak terlantar. Dana yang ditujukan untuk menunjang kegiatan kesejahteraan sosial harus dibagi untuk pelayanan kepada 26 PMKS yang ada. Keterbatasan dana juga dipengaruhi dengan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran.

3.3. Sarana dan Prasarana

Penulis melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar berdasarkan aspek sarana dan prasarana, Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam suatu

kegiatan organisasi bertujuan untuk menghasilkan hasil pelayanan yang baik dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.
Data Ketersediaan Sarana dan Prasarana Program Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Kegiatan	No.	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)
Pelayanan Kesejahteraan Anak di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	1	Kendaraan Rodas 4	1	1	-
	2	Kendaraan Roda 2	2	2	-
	3	Laptop	2	2	-
	4	Komputer	4	4	-
	5	Printer	3	3	-
JUMLAH			12	12	-
Pelayanan UPT. Rehabilitasi Sosial	1	Kantor	1	1	-
	2	Asrama/ Barak (1 Kamar 2 Orang)	24	24	-
	3	Rumah Dinas Pegawai	2	2	-
	4	Mushola	1	1	-
	5	Ruang Karaoke	1	1	-
	6	Ruang Rapat	1	1	-
	7	Dapur	1	1	-
	8	Ruang Makan Penghuni Panti	1	1	-
	9	Gudang	1	1	-
	10	Rumah Aman	1	1	-
	11	Pos Keamanan	1,	1	-
	12	Kendaraan Roda 2	1	1	-
	13	Laptop	3	3	-
	14	Komputer	2	2	-
	15	Printer	2	2	-
JUMLAH			43	43	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang 2022

Pada **Tabel 3.** dijelaskan bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial terdapat 12 jenis sarana dan prasarana yang bertempat di sekretariat Dinas Sosial dan 35 jenis sarana dan prasarana yang berada di UPT. Panti Rehabilitasi Sosial. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kegiatan pelayanan dalam kondisi baik dan tidak ada satu pun yang mengalami kerusakan, namun masih ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang dalam melaksanakan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut ditegaskan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mengatakan “walaupun masih ada beberapa kekurangan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pelayanan bagi anak terlantar. Kami sebenarnya masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional untuk memobilisasi dan penjangkauan anak terlantar”. Selanjutnya Kepala UPT. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mengatakan “bahwa Kami juga kekurangan fasilitas panti seperti poliklinik untuk penghuni panti, ruang pelatihan

dikarenakan untuk saat ini ruang pelatihan kami tempatkan di aula, serta perbaikan taman bermain untuk wahana rekreasi anak terlantar di panti”.

Penulis menyimpulkan pengukuran efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak di Kabupaten Tangerang dapat diukur oleh sarana dan prasarana bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Dinas Sosial dan UPT. Panti Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tangerang belum memenuhi kebutuhan pelayanan dikarenakan masih adanya kekurangan sarana dan prasarana. Sarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan seperti kendaraan operasional untuk mobilisasi anak terlantar serta televisi untuk informasi dan hiburan anak di dalam panti. Sedangkan, untuk prasarananya yang dibutuhkan poliklinik, ruang pelatihan dan perbaikan taman bermain di dalam panti rehabilitasi sosial.

3.4. Kualitas dan kuantitas

Berdasarkan pengamatan dilapangan dapat diterangkan bahwa terdapat 40 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Tangerang dan menampung anak terlantar sebanyak 2776 anak dan UPT. Panti Rehabilitasi Sosial sendiri menampung 42 anak, jadi jumlah total anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dasar sebanyak 2818 anak. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya anak terlantar di Kabupaten Tangerang yang mencapai 66033 anak (BPS, Tahun 2021). Hal ini dipertegas oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa “untuk tahun lalu belum semua anak terlantar mendapatkan pelayanan dan akan lebih kami maksimal di tahun ini”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan panti dan LKSA tersebut masih tergolong masih sedikit di bandingkan jumlah keseluruhan anak terlantar di Kabupaten Tangerang. Masih ada anak terlantar yang belum mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial sendiri berusaha memaksimalkan pelayanan di tahun 2022 yang diharapkan seluruh anak terlantar mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.

3.5. Waktu

Penulis melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar berdasarkan aspek waktu. Waktu yang di terangkan dalam penelitian ini berupa target, ketepatan dan optimalisasi waktu dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 4.

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2020	Target 2021	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana prasarana dan pembinaan Anak Terlantar di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	Jumlah anak terlantar di LKSA yang mendapatkan bantuan	Org	200	250	100
Penanganan, Penitipan dan Pemulangan Penyandang Masalah	Jumlah PMKS anak terlantar mendapatkan penanganan	org	80	100	100

Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
Pelatihan Keterampilan Bagi anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat keterampilannya	Orgg	100	150	92,87
Pusat pengembangan bimbingan/konseling bagi penyandang Masalah sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapat Bimbingan Konseling	Org	100	100	100
Fasilitasi Bantuan Anak Terlantar Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	Org	100	100	94,25
Operasional Panti Rehabilitasi PMKS	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan di UPT. Rehabilitasi PMKS	Org	135	150	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang 2022

Berdasarkan data **Tabel 4.** dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator program pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang mencapai 100 terkecuali 2 kegiatan tidak mencapai target yaitu pertama, program Pelatihan Keterampilan Bagi anak Terlantar dengan capaian kinerja 92,87%, capaian ini belum tercapai dikarenakan masih Belum optimalnya fasilitasi sarana dan prasarana Keterampilan Bagi anak Terlantar. kedua, Fasilitasi Bantuan Anak Terlantar Luar Panti dengan capaian kinerja 94,25%, capaian ini belum tercapai dikarenakan belum semua Anak Terlantar di Kabupaten Tangerang yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya. Penulis menyimpulkan bahwa target pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang masih sedikit sedikit dibandingkan dengan jumlah anak terlantar yang ada di Kabupaten Tangerang. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pelayanan bagi anak terlantar masih terdapat indikator yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengurangi jumlah anak terlantar dan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta mewujudkan kewajiban pemerintah dalam menangani keterlantaran yang telah tertuang dalam undang-undang. Sama halnya dengan temuan Nisah & Hamam bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban atas keberadaan anak terlantar, kewajiban itu berupa memberikan pelayanan dan perlindungan atas segala hak dasar yang dimiliki anak terlantar (Nisah & Hamam, 2021). Keberadaan anak terlantar di suatu daerah dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Layaknya program lainnya, program pelayanan kesejahteraan sosial masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia, keadaan anggaran yang tidak mencukupi, sarana dan prasana yang kurang, masih banyak anak terlantar yang belum menerima pelayanan dasar, serta target capaian kinerja yang masih rendah, layaknya temuan (Biru dkk, 2021). karakteristik dari pelayanan ini adalah program kesejahteraan bagi anak terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program perlindungan sosial, rahabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta diiringi

densn upsys pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Angelina, dkk (Agustino dkk, 2019).

Adanya program pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang diharapkan mampu mengurangi jumlah anak, bertambahnya anak terlantar yang menerima pelayanan dasar sertamengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Leni & Dedi yang menyatakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar, maka perlu dibuat kebijakan yang diarahkan pada kepentingan dan permasalahan anak terlantar, serta perlu adanya peningkatan pendekatan dan program pelayanan untuk memaksimalkan kinerja Dinas Sosial (Leni & Dedi, 2020).

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pelyanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Tangerang yakni sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, masih terbatasnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), masih kurangnya kesadaran dan kepeduliannya masyarakat terhadap keberadaan anak terlantar, serta semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah terlaksana, namun masih terdapat beberapa aspek penunjang pelayanan yang belum terpenuhi. Pada sumber daya bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tangerang masih kekurangan sumber daya manusia baik di sekretariat Dinas Sosial ataupun UPT. Rehabilitasi Sosial Kabupaten Tangerang; pada dana bahwa Dinas Sosial masih masih kurang dana untuk menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial; pada sarana dan prasarana bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mengalami kekurangan sarana prasana penunjang pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar seperti kendaraan operasional, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya; pada kualitas dan kuantitas dijelaskan bahwa kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sedangkan secara kuantitas masih banyak anak terlantar belum menerima pelayanan; pada aspek waktu dijelaskan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, namun terdapai capaian kinerja yang tercapai terutama pada kegiatan pelatihan dan keterampilan bagi anak terlantar dan kegiatan fasilitasi bantuan anak terlantar luar panti dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu mdan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina N, Setyawan D. (2019). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi di Dinas Sosial Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Unitri*. Vol 8, No 1
<https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1535>
<https://www.beritasatu.com/archive/419548/41-juta-anak-di-indonesia-telantar.html>
<https://www.jurnaltangerang.co/berita-dinsos-ngaku-kurang-anggaran-untuk-atasasi-masalah-sosial.html>
- Cahyadi, B. B. N., Puspitasari, N. Z. ., Britania, D. A. ., & Wahyudi, K. E. . (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 731–742. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i5.153>
- Agustina N, Setyawan D. (2019). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Unitri*. Vol 8, No 1,
<https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1535>
- Husna, L., & Epriadi, D. (2020). Analisis Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 865-870.
<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.865-870>
- Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2021
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2021
- Nisah, H., & Hamam, H. (2021). Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(2), 173–183. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.59>
- Sajow, A., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2019). Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Manado. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 1-9.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26215>
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedua Puluh Tiga*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung : Alfabeta.